

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan komunikasi politik berjalan selaras dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, yang membuat penggunaan media dalam ruang politik menjadi tidak terelakkan. Dalam sistem demokrasi, media khususnya media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga telah bertransformasi menjadi ruang partisipasi publik serta instrumen kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, media massa juga dapat memengaruhi opini publik, membentuk persepsi politik, dan memoderasi interaksi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat (Farid, 2023).

Perkembangan tersebut semakin menjelaskan bahwa media massa telah menjelma sebagai alat yang strategis dalam ruang politik. Media massa ramai-ramai digunakan oleh politisi, kelompok kepentingan, dan aktor politik lainnya untuk menguatkan pesan yang dibawakan dan memajukan agenda mereka untuk mendapatkan legitimasi terhadap kekuasaan (Ramlan et. al., 2025). Media massa dimanfaatkan dengan menentukan isu yang dianggap penting, aktor yang akan ditonjolkan, serta bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh publik, sehingga opini yang terbentuk di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Melalui produksi pemberitaan yang netral dengan analisis komprehensif dan memperlihatkan berbagai perspektif yang berbeda, media meningkatkan level moderasi dialog politik dengan menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan (Ritonga, 2023).

Meski begitu, media massa telah menjadi alat strategis yang telah melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan implementasi politik di Indonesia. Salah satu bentuk media massa yang digunakan dalam adalah media daring atau media *online*. Media *online* merupakan media berbentuk teks, gambar, video, atau suara yang dapat diakses dan dikonsumsi melalui berbagai platform seperti website, news, aplikasi, dan sosial media (Arpandi, 2023). Salah satu media *online* yang populer dan berpengaruh di Indonesia adalah SINDOnews.com. Portal ini merupakan bagian dari iNews Media Group dan menjadi salah satu terobosan MNC Group untuk

beradaptasi di era *new media* (media baru). Mengutip dari laman resmi SINDOnews.com, SINDOnews.com memiliki tagline “Bukan Berita Biasa” yang membedakan portal ini dengan media lain. SINDOnews.com memberitakan berbagai kategori seperti informasi nasional, metronews, daerah, ekonomi dan bisnis, internasional, olahraga, otomotif, sains, teknologi, edukasi, Gen Sindo, Kalam dan Lifestyle. SINDOnews.com menjadi salah satu kanal berita online populer di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan riset media online Indonesia yang paling dipercaya masyarakat pada tahun 2024 yang dilakukan oleh *Reuters Institute Study for Journalism*, di mana SINDOnews.com menempati posisi ke-10 (Steele, 2024). Selain itu, SINDOnews.com juga meraih penghargaan Media Daring Terbaik dalam kategori mitra pendukung pada Anugerah Diktisaintek 2025 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada 19 Desember 2025 (Kemendiktisaintek, 2025). Dengan penghargaan yang didapatkan oleh outlet media online tersebut, SINDOnews.com mengukuhkan posisinya sebagai salah satu media online terbesar di Indonesia.

Dalam konteks ini, posisi SINDOnews.com sebagai salah satu media daring terbesar di Indonesia menjadi penting untuk diperhatikan karena SINDOnews.com merupakan bagian dari MNC Group, sebuah konglomerasi media yang memiliki jaringan luas di berbagai platform. MNC Group yang memiliki nama hukum PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR membawahi perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN yang merupakan kepala dari sejumlah perusahaan media seperti televisi (RCTI, GTV, MNCTV), radio, outlet berita (Okezone, SINDOnews, iNews), dan OTT (Masduki, et. al, 2022). MNC Group dikepalai oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama dan Ketua Umum dari Partai Perindo. Selain Hary Tanoe, ada beberapa nama di jajaran direksi MNC Group yang bersinggungan dengan partai politik, seperti istri dan anak-anak dari Hary Tanoe yang menjadi caleg DPR RI, dan Syafril Nasution (Direktur) yang menjabat sebagai Wakil Ketua Perindo dan caleg DPR RI dari Dapil Jawa Tengah (Masduki, et. al., 2022: 28). Keadaan tersebut menjadikan SINDOnews.com tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem media yang berpotensi membawa kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Dalam kurun waktu setahun terakhir, SINDOnews.com secara aktif memberitakan berbagai isu

politik nasional seperti demonstrasi, kebijakan pemerintah, hingga dinamika relasi antar negara dan masyarakat sipil. Dalam proses produksi berita tersebut, SINDOnews.com melakukan *framing* untuk memilah peristiwa.

Proses *framing* dilakukan dengan prosedur memilih isu, penekanan pada aktor tertentu, pemakaian diksi pada berita, dan penyusunan narasi yang secara implisit membentuk pemikiran masyarakat terhadap peristiwa tersebut. *Framing* merupakan mekanisme mengenai realitas/dunia diciptakan dan disimplifikasi kepada para pembaca (Gitlin dalam Eriyanto, 2018: 80). Pemberitaan menghadirkan berbagai peristiwa yang sedikit menonjol dan menarik perhatian para pembaca. Lebih lanjut, Gitlin menjelaskan bahwa *frame* menjadi hal yang lumrah dalam praktik jurnalistik. Dengan menggunakan *frame*, jurnalis mencerna informasi-informasi yang dikumpulkan dan dirangkum ke dalam pemahaman tertentu yang nantinya akan dikonsumsi oleh para pembaca. Terdapat 2 faktor dalam *framing*, yaitu memilih fakta dan menuliskan fakta (Eriyanto, 2018: 81).

Proses memilih fakta dilandaskan dengan hipotesis jurnalis dengan dua kemungkinan, yaitu fakta apa yang dipilih (*included*) dan fakta apa yang dieliminasi (*excluded*). Penafsiran atas suatu peristiwa kemungkinan berbeda-beda antara satu media dengan media lain tergantung dengan sisi yang menjadi pilihan mereka. Proses mengeliminasi fakta berkaitan dengan bagaimana fakta yang dipilih ditampilkan, apakah diungkapkan dengan kata, kalimat atau proposisi tertentu, dibantu dengan foto atau gambar, dan lainnya. Proses eliminasi fakta juga menggunakan perangkat tertentu seperti penempatan yang menonjol, pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu saat individu menjadi pusat pemberitaan asosiasi terhadap budaya, generalisasi, simplifikasi, pemakaian kata yang mencolok, dan sebagainya. Dengan begitu, berita akan memiliki kesempatan besar menjadi perhatian dan memengaruhi masyarakat dalam memahami suatu peristiwa. *Framing* diterapkan dalam seluruh proses produksi berita dan berbagai jenis berita termasuk berita mengenai peristiwa politik yang meliputi pemerintahan, pemilu, konflik, *reshuffle* kabinet, dan aksi demonstrasi.

Dalam konteks demonstrasi secara general, *framing* seringkali digunakan untuk menonjolkan narasi atau diksi tertentu yang dapat mengarah ke sentimen tertentu

yang diinginkan. SINDOnews.com turut melakukan hal tersebut saat melakukan pemberitaan demonstrasi yang terjadi di Indonesia setahun terakhir. Pada demonstrasi Indonesia Gelap yang berlangsung pada 17-20 Februari 2025, berikut pemberitaan yang diproduksi oleh SINDOnews.com:

Gambar 1. 1. Pemberitaan SINDOnews.com terkait Demonstrasi Indonesia Gelap

Aksi Bakar Ban Warnai Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda

Danandaya Aria Putra Senin, 17 Februari 2025 - 12:00 WIB



Bakar ban di Patung Kuda, Jakarta (17/2/2025). Mereka akan mengikuti demo Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta. FOTO: SINDOnews.com

Bakal Ada Demo Indonesia Gelap, Jalan Menuju Istana Ditutup Barrier Beton Polisi

Danandaya Aria Putra Senin, 17 Februari 2025 - 14:16 WIB



Penutupan jalan menuju Istana Kepresidenan, Jakarta ini dilakukan imbas adanya aksi demo Indonesia Gelap yang akan diikuti mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil. Foto: Danandaya



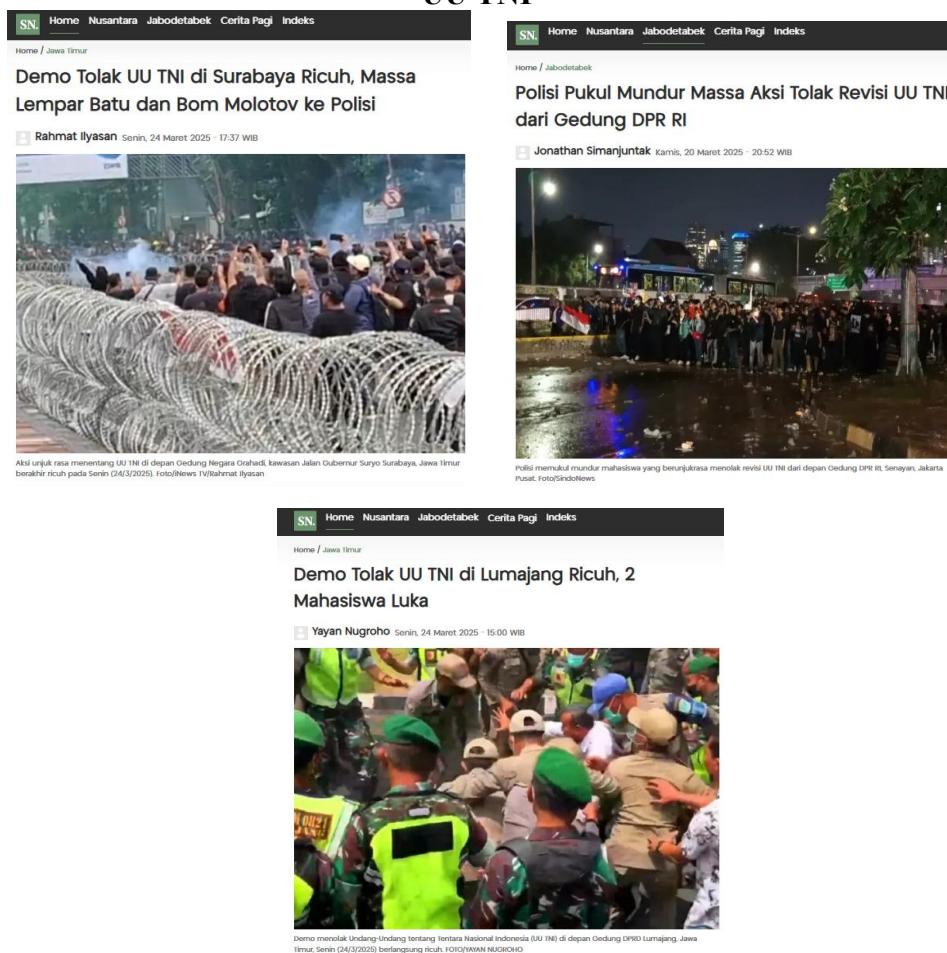
Mahasiswa UI berkumpul di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025). Mereka akan mengikuti demo Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta. FOTO: SINDOnews.com

(Sumber: SINDOnews.com)

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemberitaan di SINDOnews.com yang menunjukkan indikasi awal adanya masalah dalam penyajian berita. Dalam pemberitaan berjudul “Aksi Bakar Ban Warnai Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda”, terdapat penonjolan tindakan massa aksi melalui penggunaan diksi “warnai”. Lalu pada pemberitaan berjudul “Bakal Ada Demo

Indonesia Gelap, Jalan Menuju Istana Ditutup Barrier Beton Polisi” menaruh fokus pada tindakan antisipasi aparat dalam menutup akses jalan. Sementara itu, terdapat pula pemberitaan dengan judul, “Demo Serentak Indonesia Gelap, Bermakna Kebijakan Hari Ini Tanpa Ada Terangnya”. Pola pemilihan judul dan penggunaan diksi yang mencolok pada postingan-postingan tersebut mengisyaratkan adanya dugaan bias pemberitaan yang perlu diteliti lebih lanjut guna melihat objektivitas medianya. SINDOnews.com juga melakukan *framing* dalam peristiwa demonstrasi Penolakan UU TNI yang terjadi pada akhir Maret 2025:

Gambar 1. 2. Pemberitaan SINDOnews.com terkait Demonstrasi Penolakan UU TNI



(Sumber: SINDOnews.com)

Penyajian berita di SINDOnews.com terkait demonstrasi penolakan revisi UU TNI menunjukkan indikasi awal adanya sentimen tertentu yang dibuat untuk

melihat aksi demonstrasi tersebut. Pada berita berjudul “Demo Tolak RUU TNI Ricuh, Massa Lempar Batu dan Bom Molotov ke Polisi”, yang menonjolkan diksi-diksi seperti “ricuh”, “lempar batu”, dan “bom molotov”. Hal yang serupa terjadi dalam pemberitaan “Demo Tolak UU TNI di Lumajang Ricuh, 2 Mahasiswa Terluka” yang memberikan ruang besar pada narasi situasi yang kacau di lapangan. Selain itu, terdapat pemberitaan berjudul “Polisi Pukul Mundur Massa Aksi Tolak Revisi UU TNI dari Gedung DPR RI” yang menggunakan diksi “pukul mundur” tanpa menyertakan penjelasan mendetail mengenai alasan substantif di balik aksi tersebut. Pola pemilihan judul dan diksi pada berita-berita ini mengisyaratkan adanya dugaan masalah dalam pembingkaihan realitas pada pemberitaan demonstrasi.

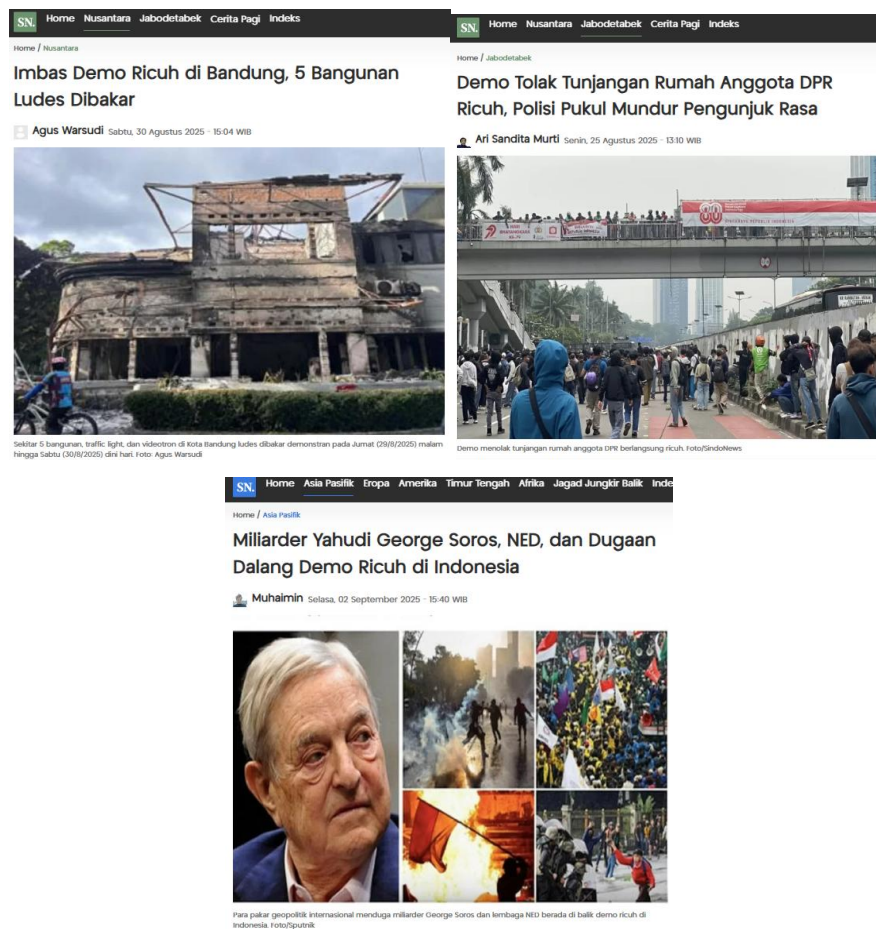
Selain kedua aksi tersebut, aksi demonstrasi yang diberitakan SINDOnews.com adalah aksi demonstrasi Agustus-September 2025. Demonstrasi ini diawali kemarahan publik pada usulan kenaikan tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp50 juta/bulan (Al-Ulamai et. al., 2025). Kemarahan publik diperparah dengan beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh anggota DPR seperti Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni yang dianggap tidak berempati dan mengabaikan suara masyarakat. Dengan kombinasi usulan kenaikan tunjangan DPR dan respon dari wakil rakyat yang dinilai nirempati, kemarahan publik meledak dan demonstrasi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Demonstrasi yang awalnya berjalan damai menjadi tidak kondusif karena tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek *online* yang dilindas kendaraan taktis Brimob pada dini hari. Tewasnya Affan oleh aparat kembali membakar amarah publik yang membuat demonstrasi meluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Demonstrasi yang terjadi pada rentang waktu 29 - 31 Agustus 2025 diwarnai tindakan represif oleh aparat yang berupa penembakan gas air mata dan peluru karet, pemukulan, dan penculikan terhadap masyarakat sipil. Selain itu, terjadi kerusakan sejumlah gedung pemerintahan, markas kepolisian, dan fasilitas umum oleh kelompok tidak dikenal. Pada 1 September 2025, pemengaruh media sosial berkumpul dan menyampaikan tuntutan yang dikenal dengan 17+8 Tuntutan Rakyat. Terdapat 25 tuntutan yang dibagi menjadi 17 tuntutan pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025 dan 8 tuntutan panjang dengan tenggat waktu 31

Agustus 2026. Tuntutan tersebut antara lain mendesak pembentukan tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan seluruh korban kekerasan oleh para aparat selama demonstrasi berlangsung, membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan menuntut transparansi anggaran, dan secara transparan mengadili seluruh anggota dan komandan yang terlibat dalam melakukan tindak kekerasan.

Dengan kompleksnya dinamika dari demonstrasi tersebut, SINDOnews.com sebagai media *online* tentunya ikut meliput dan memproduksi berita terkait demonstrasi Agustus-September 2025 dengan melakukan *framing* sebagai bagian dari strategi media untuk menentukan bagian mana dari realitas yang akan ditonjolkan kepada publik. Berikut *framing* yang dilakukan SINDOnews.com dalam memberitakan peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025:

Gambar 1. 3. Pemberitaan SINDOnews.com terkait Demonstrasi Agustus-September 2025



Nazwa Patrika, 2026

ANALISIS FRAMING SINDONEWS.COM PADA PEMBERITAAN DEMONSTRASI AGUSTUS-SEPTEMBER 2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Poltiik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

(Sumber: SINDOnews.com)

Pada pemberitaan SINDOnews.com terkait rangkaian demonstrasi Agustus-September 2025 menunjukkan fenomena pemakaian diksi dan pemilihan sudut pandangan tertentu yang mengindikasikan adanya kecenderungan penggunaan *framing* negatif. Hal ini tampak pada berita berjudul “Demo Tolak Tunjangan Rumah Anggota DPR, Ricuh, Polisi Pukul Mundur Pengunjuk Rasa” yang memberikan penekanan pada diksi “ricuh” dan tindakan “pukul mundur” oleh aparat. Data serupa ditemui dalam berita berjudul “Imbas Demo Ricuh di Bandung, 5 Bangunan Ludes Dibakar” yang secara dominan menyajikan narasi dampak kerusakan fisik dan kerugian material akibat aksi massa. Selain itu, terdapat pemberitaan berjudul “Miliarder Yahudi George Soros, NED, dan Dugaan Dalang Demo Ricuh di Indonesia” yang berisikan narasi mengenai dugaan intervensi aktor asing dan lembaga internasional di balik aksi demonstrasi yang berlangsung. Fenomena pemilihan judul dan diksi yang konsisten menonjolkan aspek gangguan keamanan serta konspirasi eksternal ini menjadi bukti empiris adanya dugaan masalah *framing* yang dilakukan SINDOnews.com.

Dengan melihat bagaimana SINDOnews.com melakukan *framing* terhadap aksi demonstrasi, dapat dilihat bahwa aksi demonstrasi seringkali diberitakan dengan menonjolkan diksi yang mengkerdikan aksi massa, khususnya pada aksi demonstrasi Agustus-September 2025. *Framing* yang dilakukan SINDOnews.com tersebut mengindikasikan adanya pola *protest paradigm* atau paradigma protes yang merujuk pada pola peliputan media yang berfokus menunjukkan aspek kekerasan dan destruktif dari aksi demonstrasi, yang ditulis seperti berita kriminal, menonjolkan penampilan atau ketidaktahuan massa aksi, menihilkan dampak aksi, berfokus pada aspek teaterikal dan mengabaikan isu yang dibawa, menciptakan opini publik yang melawan demonstran, dan mengutamakan sumber yang berasal dan mendukung pemerintah (McLeod, 2007). Penerapan paradigma protes ini dapat mendelegitimasi gerakan sosial dan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat dengan mengalihkan fokus dari tuntutan dan substansi menjadi narasi ancaman keamanan yang menonjolkan bentrokan dan kerusakan fasilitas umum. Pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025, fokus pemberitaan yang

seharusnya meliputi berbagai tuntutan massa aksi seperti penolakan tunjangan rumah untuk DPR, penghapusan *outsourcing*, penolakan upah murah, penyetopan PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, revisi UU Pemilihan Umum, dan pengusutan kematian Affan Kurniawan digeser menjadi kericuhan, pembakaran gedung, dan konspirasi global. Demonstran diposisikan sebagai pihak yang berperilaku destruktif sedangkan aparat diposisikan menjadi aktor pengendali keamanan. Pola paradigma protes yang dilakukan oleh SINDOnews.com tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aspek-aspek ekonomi politik media.

Dalam perspektif ekonomi politik media Mosco, penggunaan paradigma protes pada *framing* dalam pemberitaan aksi demonstrasi tidak bebas nilai, melainkan berkaitan erat dengan strukturisasi media, khususnya melalui relasi patronase dan klientelisme. Strukturisasi merupakan mekanisme di mana struktur sosial diciptakan oleh tindakan manusia, tetapi di saat yang bersamaan struktur tersebut membatasi dan mengarahkan tindakan manusia (Mosco, 2009). Struktur bukan sekedar sebuah bangunan institusional, melainkan sebuah dualitas yang terdiri dari aturan (*rules*) yang membatasi dan sumber daya (*resources*) yang memberdayakan agensi jurnalis (Mosco, 2009: 186). Strukturisasi melihat interaksi jurnalis sebagai agen dan pemilik media dan afiliasi politiknya sebagai struktur. Dengan ketimpangan kekuasaan yang dimiliki oleh jurnalis serta kepentingan yang dimiliki oleh pemilik media, maka jurnalis terbelenggu aturan yang berlaku. Hal ini menjadikan ruang redaksi berita tidak bebas nilai dan berpotensi memihak ke salah satu sisi. Hubungan antara stukturisasi dan politisasi framing diperkuat oleh fenomena patron-klien politik dalam media. Patron-klien dalam media dijalankan dengan patron yakni pemilik media sebagai pemilik akses dan pengendali sumber daya memberikan sumber daya tersebut kepada klien yakni jurnalis sebagai imbalan atas dukungan dan loyalitas politik yang diberikan (Roudakova, 2008: 43a). Hal ini dapat memicu terjadinya instrumentalisasi media, di mana kanal pemberitaan digunakan secara sadar oleh aktor yang memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi politik dan memajukan kepentingan yang partikularistik (Hallin dan Mancini, 2004). Di bawah ruang produksi yang kental akan klintelisme, jurnalis cenderung mengabaikan etika jurnalistik untuk netral dan lebih menonjolkan

dukungan untuk memberikan sentimen positif bagi patronase dan memberikan sentimen negatif bagi lawan politik sang patron (Roudakova, 2008: 43b). *Framing* kemudian menjadi alat bagi struktur kekuasaan untuk melakukan penggiringan opini melalui proses seleksi fakta dan eliminasi fakta.

Dalam konteks SINDOnews.com, Hary Tanoesoedibjo sebagai pemilik dari MNC Group yang menaungi SINDOnews.com dan juga ketua partai politik Perindo memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang kuat. Hal ini menempatkan SINDOnews.com dalam posisi yang tidak sepenuhnya netral dalam produksi pemberitaan. Dalam konsep strukturisasi, kepemilikan media yang berperan sebagai struktur yang menyediakan sumber daya, tetapi juga membatasi ruang gerak jurnalis melalui kepentingan yang dibawa oleh pemilik. Hary Tanoesoedibjo yang kini merapat ke pemerintahan Prabowo ikut membawakan kepentingan dari pemerintahan.

Dengan demikian, proses produksi berita di SINDOnews.com tidak hanya dipengaruhi oleh fakta di lapangan dan pertimbangan jurnalistik, tetapi juga oleh kepentingan politik yang luas. Hal ini dapat menjelaskan *framing* yang dilakukan SINDOnews.com terhadap aksi demonstrasi. Dalam kasus demonstrasi Agustus-September 2025, strategi ini termanifestasi dalam penggunaan paradigma protes, di mana media secara sistematis memarginalkan aksi massa dengan lebih menonjolkan aspek anarkisme, kericuhan, atau gangguan ketertiban umum daripada substansi tuntutan demonstran. Dengan memposisikan demonstran sebagai ancaman keamanan, SINDOnews.com membangun narasi yang membenarkan tindakan aparat dan mendiskreditkan gerakan rakyat sebagai aspirasi yang tidak sah. Oleh karena itu, strategi *framing* negatif terhadap demonstrasi Agustus-September 2025 bukanlah sekadar dinamika jurnalistik biasa, melainkan produk dari relasi kuasa yang dipolitisasi demi menjaga kepentingan ekonomi-politik korporasi MNC Group.

Untuk memperkuat dan memperbanyak pengetahuan terkait dengan permasalahan di atas, terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto dan Purworini (2021) berjudul **“Demonstrasi sebagai Respon Penolakan RKUHP dan RUU KPK di Media Online: Analisis *Framing* pada Kompas.com”** menjelaskan bahwa *framing* yang dilakukan Kompas menunjukkan latar belakang demonstrasi menolak RKHUP dan UU KPK serta respon pemerintah yaitu DPR yang tetap melanjutkan pembahasan RUU dan Presiden Joko Widodo yang menunda pembahasan RKUHP dan berencana menerbitkan Perppu untuk UU KPK yang sudah disahkan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Budiyanto dan Purworini, meskipun sama-sama meneliti *framing* media *online* pada aksi demonstrasi, namun penelitian penulis menganalisis pada apa yang membentuk konstruksi realitas pemberitaan SINDOnews.com terhadap demonstrasi Agustus-September 2025. Kelemahan penelitian Budiyanto dan Purworini adalah hanya fokus menganalisis teks tanpa membedah alasan mengapa media *online* menggunakan sudut pandang tersebut dalam *framing* aksi demonstrasi. Dengan begitu, keunggulan penelitian penulis terletak pada upaya menggabungkan analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media Vincent Mosco untuk mengungkap bagaimana kepemilikan media, relasi kuasa, dan kepentingan ekonomi ikut membentuk konstruksi realitas pada aksi demonstrasi Agustus–September 2025.

Kedua, penelitian yang dilakukan Febriani, et. al. (2022) berjudul, **“ANALISIS *FRAMING* POLRI PADA PENANGANAN DEMONSTRASI UU CIPTA KERJA DI KOMPAS.COM DAN DETIK.COM”** menjelaskan bahwa Kompas.com membingkai penanganan yang dilakukan Polri tidak sesuai tupoksi karena Polri bertindak agresif dan represif. Sementara itu, Detik.com membingkai kejadian tersebut dengan menampilkan bahwa Polri telah bekerja dengan baik dan menyudutkan kelompok anarko yang melakukan keributan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Febriani, et. al., meskipun sama-sama meneliti *framing* media *online* terhadap aksi demonstrasi, namun penelitian penulis menganalisis pada apa yang membentuk konstruksi realitas pemberitaan SINDOnews.com terhadap demonstrasi Agustus-September 2025. Kelemahan penelitian Febriani, et. al. adalah hanya fokus menganalisis teks berita tanpa menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan media *online* memilih perspektif tertentu dalam membingkai demonstrasi. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis terletak

pada upaya menggabungkan analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media Vincent Mosco untuk mengungkap bagaimana kepemilikan media, relasi kuasa, dan kepentingan ekonomi ikut membentuk konstruksi realitas pada aksi demonstrasi Agustus–September 2025.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Novran, et. al. (2024) berjudul **“ANALISIS *FRAMING* BERITA KONFLIK VERTIKAL ANTARA PEMERINTAH DAN DEMONSTRAN PRO-DEMOKRASI THAILAND (Studi pada BBC.com periode Agustus - Oktober 2020)”** menjelaskan *bahwa* framing yang dilakukan BBC.com menyoroti aksi demonstrasi pro-demokrasi di Thailand yang menentang pengambilalihan kekuasaan pemerintahan oleh PM Prayuth Chan-O Cha dengan pembungkaman yang positif dan memihak kepada rakyat. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Novran, et. al (2024), meskipun sama-sama meneliti *framing* yang dilakukan media *online* terhadap aksi demonstrasi, namun penelitian penulis mengkaji berbagai dimensi yang melatarbelakangi konstruksi pemberitaan SINDOnews.com seperti relasi kekuasaan, kepemilikan media, dan kepentingan ideologi yang turut ikut membentuk *framing* yang digunakan. Kelemahan penelitian Novran, et. al. yaitu analisis hanya berhenti di tahap deskriptif dan tidak memberikan alasan mengapa BBC.com membungkam demonstrasi yang dilakukan di Thailand dengan memihak rakyat. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis terletak pada integrasi analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media dalam membaca pemberitaan demonstrasi yang diproduksi oleh SINDOnews.com.

Keempat, penelitian yang dilakukan Darmawan, et. al. (2025) berjudul **“ANALISIS *FRAMING* DALAM PEMBERITAAN WEBSITE CNN INDONESIA.COM TENTANG DEMONSTRASI “INDONESIA GELAP” PERIODE 21 FEBRUARY 2025”** oleh Darmawan, et. al (2025) menjelaskan bahwa aksi demonstrasi Indonesia Gelap dibungkam CNNIndonesia.com sebagai tindakan kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum, dengan menonjolkan elemen kekerasan dari massa aksi sehingga substansi tuntutan menjadi kabur dan terpinggirkan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Darmawan, et. al., meskipun sama-sama meneliti *framing* media *online* pada aksi demonstrasi, namun penelitian penulis mengkaji faktor-faktor yang dapat menjadi alasan

SINDOnews.com memilih *framing* pada produksi berita demonstrasi Agustus-September 2025 seperti dimensi ekonomi-politik, relasi kekuasaan, maupun kepemilikan media. Kelemahan penelitian Darmawan, et. al. adalah jumlah data yang terbatas serta tidak adanya analisis yang komprehensi terhadap proses produksi berita, sehingga penelitian ini hanya menjawab pertanyaan “apa” dan tidak menjawab pertanyaan “bagaimana”. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis terletak pada integrasi analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif terhadap praktik konstruksi realitas media.

Kelima, penelitian yang dilakukan Kristiyani (2025) berjudul “**Analisis *framing* pemberitaan media: dinamika pengesahan RUU PPRT menggunakan model Robert M. Entman**” oleh Kristiyani (2025) menunjukkan bahwa keempat kanal berita secara konsisten menekankan pentingnya pengesahan RUU PPRT dan memandang politisi, legislatif, serta DPR mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelesaikan pengesahan RUU PPRT sebagai upaya melindungi PRT yang merupakan kelompok rentan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Kristiyani., meskipun sama-sama meneliti *framing* media *online* pada aksi demonstrasi, namun penelitian penulis tidak melakukan komparasi dan mengkaji bagaimana konstruksi realitas pemberitaan demonstrasi Agustus–September 2025 oleh SINDOnews.com dilatarbelakangi relasi kuasa, kepemilikan media, dan kepentingan ekonomi-politik dalam proses produksi berita. Kelemahan penelitian Kristiyani adalah terbatas hanya pada analisis deskriptif dan tidak mengeksplor lebih jauh terkait penyebab keseragaman *framing* pada keempat berita terkait substansi yang sama. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis terletak pada integrasi analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif terhadap praktik konstruksi realitas media.

Keenam, penelitian yang dilakukan Danso (2025) berjudul “***Media and politics: investigating government interests, ownership influence and media independence in combating corruption in Ghana***” oleh Danso (2025) menjelaskan adanya pengaruh pemerintah yang signifikan dalam memantau media, terutama untuk mengontrol narasi publik dan menutupi aktivitas korupsi. Selain itu,

ditemukan bahwa afiliasi politik pemilik media secara kuat memengaruhi keputusan editorial, di mana jurnalis sering kali merasa tertekan untuk menyelaraskan pemberitaan dengan kepentingan pemilik demi keamanan pekerjaan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Danso, meskipun sama-sama meneliti dimensi seperti relasi kekuasaan yang memengaruhi keputusan editorial di sebuah media, namun penelitian penulis menggunakan demonstrasi Agustus–September 2025 untuk melihat bagaimana SINDOnews.com sebagai media *online* yang berada di korporasi konglomerasi media membingkai peristiwa tersebut melalui relasi kuasa, kepemilikan, dan kepentingan ekonomi-politik yang bekerja dalam produksi berita. Kelemahan penelitian Danso adalah belum menghubungkan analisis *framing* terhadap konten pemberitaan sebagai bukti tertulis dari pengaruh kepemilikan media yang ditemukan, sehingga relasi antara struktur kekuasaan dan konstruksi realitas dalam teks berita tidak dapat diverifikasi secara langsung. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis terletak pada upaya menggabungkan analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media untuk melihat bagaimana struktur kekuasaan ikut membentuk konstruksi realitas demonstrasi di media.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Papaioannou (2021) berjudul ***“Dominant and Emerging News Frames in Protest Coverage: The 2013 Cypriot Anti-Austerity Protests in National Media”*** menunjukkan bahwa pemberitaan oleh empat media nasional Siprus justru menyimpang dari paradigma protes dan memvalidasi demonstrasi anti-kebijakan penghematan di Siprus tahun 2013 melalui kedaulatan nasional, ketidakadilan sosial, dan penerimaan kebijakan penghematan. Meski begitu, mayoritas sumber berita berasal dari kalangan elit politik nasional dan internasional. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Papaioannou, meskipun sama-sama meneliti *framing* media terhadap aksi demonstrasi, namun penelitian penulis mengkaji bagaimana konstruksi realitas pemberitaan demonstrasi Agustus–September 2025 oleh SINDOnews.com dilatarbelakangi relasi kuasa, kepemilikan media, dan kepentingan ekonomi-politik dalam proses produksi berita. Kelemahan penelitian Papaioannou adalah belum mengkaji bagaimana struktur kepemilikan media dan relasi kekuasaan masing-masing media memengaruhi penggunaan *framing* yang digunakan. Oleh karena itu, keunggulan penelitian

penulis terletak pada integrasi *framing* dengan ekonomi politik media pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 oleh SINDOnews.com.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Kilgo dan Mourao (2021) berjudul ***“Protest Coverage Matters: How Media Framing and Visual Communication Affects Support for Black Civil Right Protests”*** menunjukkan bahwa artikel mengenai gerakan protes hak sipil masyarakat kulit hitam dengan bingkai legitimasi meningkatkan dukungan terhadap demonstran, identifikasi dengan demonstran, dan kritik terhadap polisi dibandingkan artikel yang menggunakan bingkai kerusakan dan bingkai konfrontasi meningkatkan kritik terhadap demonstran, menurunkan dukungan dan identifikasi terhadap gerakan, serta menurunkan kritik terhadap polisi. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Kilgo dan Mourao, meskipun sama-sama meneliti *framing* media terhadap aksi demonstrasi, namun penelitian penulis mengkaji dimensi apa saja yang menjadi alasan konstruksi realitas pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 oleh SINDOnews.com. Kelemahan penelitian Kilgo dan Mourao adalah belum mengkaji dimensi-dimensi yang memengaruhi pemilihan *framing* pada gerakan protes hak sipil masyarakat kulit hitam, sehingga mekanisme *framing* di balik teks berita tidak dijelaskan secara struktural. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis adalah integrasi *framing* dengan ekonomi politik media pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 oleh SINDOnews.com.

Sembilan, penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Harlow (2021) berjudul ***“Protest, Media Coverage, and a Hierarchy of Social Struggle: How Emotional Framing on Facebook Shapes Audience Reactions”*** menunjukkan bahwa berita demonstrasi yang diposting di Facebook dengan bingkai kerusakan berkolerasi kuat dengan bahasa emosional negatif dan amarah, serta memicu lebih banyak reaksi *angry* dan *sad* oleh audiens, *spectacle frame* meningkatkan semua jenis emoji kecuali *angry*, dan *debate frame* yang melegitimasi demonstran memicu lebih sedikit respon secara keseluruhan. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Brown dan Harlow, meskipun sama-sama meneliti *framing* media terhadap aksi demonstrasi, namun penelitian penulis mengkaji akar struktural yang menjelaskan apa yang melatarbelakangi *framing* SINDOnews.com pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025. Kelemahan penelitian Brown

dan Harlow adalah belum mengkaji bagaimana struktur kepemilikan media dan relasi patronase politik secara struktural menentukan pilihan *frame* yang digunakan dalam posting tersebut, sehingga mekanisme produksi *framing* yang bersifat sistematis tidak dapat dijelaskan. Oleh karena itu, keunggulan penelitian penulis terdapat pada integrasi teori *framing* dan konsep ekonomi politik media untuk membedah pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 oleh SINDOnews.com.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Ragragio (2022) berjudul “***Framing media populism: The political role of news media editorials in Duterte’s Philippines***” menjelaskan terdapat tiga kategori besar bingkai media dalam memberitakan pemerintahan otoriter populis Rodrigo Duterte di Filipina, yaitu bingkai degradasi karakter yang mengkritik aliansi politik Duterte, bingkai pro-pemerintah yang cenderung optimis dan mendukung narasi ekonomi serta hubungan luar negeri pemerintah, dan bingkai non-editorial yang menunjukkan kegagalan media dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui sikap netral atau subtil yang justru menguntungkan rezim. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Brown dan Harlow, meskipun sama-sama meneliti *framing* media terhadap aksi demonstrasi, namun penelitian penulis tidak hanya melihat media sebagai pengawas atau pendukung kekuasaan, tetapi juga berupaya menjelaskan bagaimana pembingkai demonstrasi Agustus–September 2025 dibentuk oleh relasi kuasa, kepemilikan media, dan kepentingan ekonomi-politik dalam produksi berita. Kelemahan penelitian Ragragio adalah belum menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi *framing* yang dipilih oleh empat media besar di Filipina, sehingga analisis terhenti pada pengelompokkan kategori *framing* tanpa penjelasan kausal yang memadai. Oleh karena itu, keunggulan penelitian ini terletak pada integrasi analisis *framing* dengan perspektif ekonomi politik media untuk menelaah bagaimana konstruksi realitas demonstrasi dimediasi oleh struktur kekuasaan di balik media.

Penelitian ini belum menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi *framing* yang dipilih oleh empat media besar di Filipina, sehingga analisis terhenti pada pengelompokkan kategori *framing* tanpa penjelasan kausal yang memadai. Keterbatasan tersebut juga tampak pada jumlah editorial yang dianalisis, serta

pembatasan analisis pada editorial berbahasa Inggris yang berpotensi melewatkan nuansa *framing* yang dilakukan dalam bahasa lokal. Meski begitu, Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya memetakan ketegangan politik media di tengah ancaman terhadap kebebasan pers, serta memberikan kontribusi teoritis mengenai konsep populisme media di Asia Tenggara. Oleh karena itu, dibandingkan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat media sebagai pengawas atau pendukung kekuasaan, tetapi juga berupaya menjelaskan bagaimana pembungkaman demonstrasi Agustus–September 2025 dibentuk oleh relasi kuasa, kepemilikan media, dan kepentingan ekonomi-politik dalam produksi berita. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis framing dengan perspektif ekonomi politik media untuk menelaah bagaimana konstruksi realitas demonstrasi dimediasi oleh struktur kekuasaan di balik media.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dianalisis, *novelty* yang dimiliki oleh penelitian ini terletak pada analisis *framing* yang dilakukan SINDOnews.com pada peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025 yang diperkuat oleh perspektif ekonomi politik media milik Vincent Mosco yang bertujuan bukan hanya untuk membedah bagaimana cara SINDOnews.com melakukan pembungkaman terhadap peristiwa demonstrasi Agustus-September 2025, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana relasi kekuasaan membentuk aturan di ruang redaksi yang berdampak pada *framing* yang dijalankan redaksi SINDOnews.com. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana relasi kekuasaan secara tidak langsung dapat menciptakan *framing* yang dapat membentuk persepsi masyarakat terkait dengan peristiwa politik, khususnya peristiwa demonstrasi.

1.2. Rumusan Masalah

Framing yang dilakukan SINDOnews.com dalam pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 menunjukkan adanya pola pembungkaman yang konsisten menonjolkan pola pembungkaman aspek negatif dibandingkan substansi dan tuntutan publik dari demonstrasi. Penggunaan diksi yang bermuatan negatif seperti “ricuh”, “pukul mundur”, hingga narasi konspirasi global yang dibawakan cenderung mendelegitimasi aksi demonstrasi dan memposisikan aparat sebagai aktor pengendali stabilitas negara. Fenomena ini mencerminkan adanya praktik

yang diduga kuat berkaitan dengan posisi SINDOnews.com di bawah naungan MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo, yang memiliki kepentingan politik sebagai ketua partai Perindo dan afiliasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Maka dari itu, peneliti merumuskan pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana analisis *framing* SINDOnews.com pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *framing* SINDOnews.com pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis *framing* SINDOnews.com pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian relasi media, kekuasaan, dan pembentukan opini publik dalam konteks peristiwa politik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya penerapan model *framing* Robert N. Entman dalam menganalisis pemberitaan demonstrasi di Indonesia dengan menunjukkan bahwa keempat elemen framing tidak bekerja secara independen, melainkan dibentuk secara sistematis oleh struktur kekuasaan yang melingkupi ruang redaksi. Penelitian ini juga memperkuat relevansi konsep paradigma protes (*protest paradigm*) dalam konteks pemberitaan digital di Indonesia, dengan mengidentifikasi indikator-indikator seperti demonisasi, delegitimasi, ketergantungan pada sumber resmi, dan marginalisasi suara demonstran sebagai pola yang konsisten pada media arus utama berbasis daring. Selain itu, dengan menghadirkan narasumber demonstran sebagai sumber primer yang selama ini absen dalam pemberitaan, penelitian ini turut menawarkan kontribusi metodologis berupa triangulasi sumber untuk mengungkap kesenjangan antara realitas lapangan dan realitas yang dikonstruksi media, sekaligus memperkaya penerapan perspektif ekonomi politik media Vincent Mosco dalam konteks media Indonesia yang ditandai oleh konsentrasi kepemilikan media

pada aktor-aktor yang berafiliasi dengan kekuatan politik, sehingga memperkuat relevansi kerangka Mosco untuk memahami dinamika media di negara demokrasi berkembang.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi lembaga penelitian media dan SINDOnews.com mengenai bagaimana framing pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 dibentuk oleh relasi kekuasaan yang dijelaskan melalui perspektif ekonomi politik media, sekaligus menjadi bahan evaluasi editorial terkait keberimbangan sumber, khususnya minimnya ruang bagi suara demonstran dalam proses peliputan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan bukti empiris tentang bagaimana konglomerasi media berafiliasi politik memengaruhi konstruksi pemberitaan, yang dapat menjadi dasar argumentasi bagi NGO yang bergerak dalam bidang jurnalistik dan media dalam mendorong penguatan regulasi kepemilikan media serta perlindungan independensi editorial di Indonesia. Selain itu, dengan mendokumentasikan narasi langsung dari demonstran, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kelompok masyarakat sipil dan gerakan advokasi dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif menghadapi pola framing media arus utama, sekaligus mendorong kesadaran publik untuk lebih kritis dalam membaca pemberitaan peristiwa politik yang melibatkan relasi kuasa antara negara, media, dan masyarakat sipil.

1.6.Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, berbagai penelitian terdahulu untuk yang akan menjadi sumber penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang dikaji oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori dan konsep yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian dan kerangka pemikiran yang berisikan gambaran umum dari rumusan masalah hingga menemukan jawaban penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas profil media SINDOnews.com dengan sub bab pembahasan mengenai sejarah, kepemilikan media, alur pemberitaan, dan struktur redaksi dari media *online* tersebut. Selanjutnya, bab ini membahas gambaran umum demonstrasi Agustus-September 2025 dengan sub bab pembahasan mengenai kronologi demonstrasi Agustus-September 2025. Dilanjut dengan pembahasan mengenai pola pemberitaan SINDOnews.com terkait demonstrasi Agustus-September 2025. Lalu, bab ini akan membahas analisis *framing* SINDOnews.com pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025 dengan sub bab pembahasan 10 sampel berita yang dipilih peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan sintesis *framing* pada pemberitaan demonstrasi Agustus-September 2025.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis. Kemudian kesimpulan tersebut diikuti dengan saran sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan dan kelemahan yang berkaitan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi yang digunakan penulis dalam penelitian.